

# STRATEGI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PERENCANAAN PROGRAM DESA PINTAR

**Rudy Fadrial, Meyzi Heriyanto, dan Noor Efni Salam**

Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru

**Abstract: Strategy for Utilizing Information and Communication Technology in Smart Village Program Planning. This research is qualitative research.** The aim of the study was to determine the strategy of technology and communication utilization in the smart village program in Rokan Hulu Regency. The research informants were the Head of Office, Head of Department, Head of Office, Office of Communication and Information, Head of Village, Village Head, Community and Youth Leaders. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Data analysis through processes ranging from data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that the development and governance strategy of Information and Communication Technology conducted by the Government of Rokan Hulu Regency cannot be optimally implemented.

**Key words:** strategy, information technology, communication, public services

**Abstrak: Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Perencanaan Program Desa Pintar.** Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam program desa pintar di Kabupaten Rokan Hulu. Informan penelitian adalah Kepala Dinas, Kabid, Kasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kades, Lurah, Tokoh Masyarakat dan Pemuda. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui proses mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan dan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu belum dapat dilaksanakan secara optimal.

**Kata kunci:** strategi, teknologi informasi, komunikasi, pelayanan publik

## PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK = *Information and Communication Technology/ICT*) menjadi sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

- a. Pengolahan data, pengelolaan informasi, system management dan proses kerja secara elektronik;
- b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah.

Perkembangan *TIK* yang semakin pesat harus disikapi sebagai peluang dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan jalan menyiapkan perangkat dan sistem jaringan teknologi informasi yang dapat dengan mudah diakses dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal, dan semakin transparannya akses informasi perlu disikapi dengan cepat dan tepat agar Pemerintah Daerah tetap mendapatkan kredibilitas, sehingga masyarakat mudah diajak berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat.

Perencanaan pengembangan e Government Kabupaten Rokan Hulu diawali dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 29 tahun 2012 tentang Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu menyusul ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian sebagai tindak lanjut dari rencana pengembangan e-Government Kabupaten Rokan Hulu disusunlah sebuah rencana induk tata kelola TIK yang dituangkan dalam Rencana Induk e-Government Kabupaten Rokan Hulu yang mana sampai dengan sekarang Kab. Rokan Hulu telah membangun jaringan infrastruktur internet dan intranet berupa kabel Fiber Optik dan Tower Wireless yang mengintegrasikan 27 SKPD dan 16 Kecamatan lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu.

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah Kab. Rokan Hulu maka dirasa perlu untuk membuat suatu program dan kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat pada tingkat pelayanan terendah. Pada dasarnya Pemerintahan itu ada karena adanya komunitas masyarakat yang membutuhkan pelayanan demi keteraturan dan peningkatan kesejahteraan hidup. Dan pelayanan masyarakat sesungguhnya beralih dari pelayanan birokrasi pada tingkat desa dan kelurahan yang berbasis pada data kependudukan.

Program/kegiatan ini secara umum dilaksanakan untuk Percepatan reformasi birokrasi di tingkat desa dan kelurahan, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan. Secara khusus Program/kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan efisiensi waktu, efektifitas pelayanan publik, agar terciptanya pelayanan publik yang integrated adalah agar terbukanya keterpencilan informasi dan TIK. Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah terintegrasinya pelayanan publik, terintegrasinya data base kependudukan, pelayanan publik yang lebih selektif dan tepat sasaran, dan penghematan anggaran.

Dengan kontur geografis yang unik perpaduan antara dataran, perbukitan, dan dua sungai besar yang membelah wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dibutuhkan penganggaran dana yang cukup besar untuk membuka akses antar masyarakat desa dan kecamatan maupun akses masyarakat ke pusat pemerintahan lewat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Keterlambatan informasi dan jauhnya pusat layanan kependudukan semakin menenggelamkan masyarakat desa dan kecamatan dalam kondisi ketunaan yang akut dan secara tidak langsung berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah bagaimana strategi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam program desa pintar Kabupaten Rokan Hulu?.

Menurut Thomas R Day dalam Budi Winarno (2008) Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurut Budi Winarno dan Solichin Abdul wahab dalam Suharno (2013) sepakat bahwa istilah “kebijakan” ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design.

Menurut Nugroho (2009) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan bagian atau interaksi politik, ekonomi, sosial dan kultural. Bahkan kebijakan publik adalah *melting pot* atau hasil sintesis dinamika politik, ekonomi, sosial dan kultur tempat kebijakan itu sendiri berada. Kebijakan publik merupakan bentuk dinamika tiga dimensi kehidupan setiap Negara bangsa yaitu dimensi politik, dimensi hukum dan dimensi manajemen.

Menurut Anderson dalam Budi Winarno (2008) Kebijakan Publik adalah merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau jumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Pada dasarnya, alternatif strategi Rangkuti (2009) yang diambil harus diarah-

kan pada usaha-usaha untuk menggunakan kekuatan dan mempelajari kelemahan, memanfaatkan peluang-peluang bisnis serta mengantisipasi ancaman. Pada tahap ini selanjutnya dilakukan analisis dan penentuan keputusan dengan menempatkan pendekatan matrik SWOT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam program desa pintar di Kabupaten Rokan Hulu?.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam program desa pintar di Kabupaten Rokan Hulu. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian adalah Kepala Dinas, Kabid, Kasi,

Staf, Kades, Lurah, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Teknik analisis melalui reduksi data, model data/penyajian data dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

## HASIL

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam perencanaan progra desa pintar di Kabupaten Rokan Hulu, baik faktor dengan pengaruh kuat maupun faktor yang secara lemah mempengaruhi implementasi perencanaan program dimaksud. Berdasarkan tabulasi data dan fakta hasil wawancara dengan key informasi dan beberapa informan susulan faktor kuat dan faktor lemah yang mempengaruhi nya adalah seperti tercantum pada tabel 1.

**Tabel 1. Matriks Analisis SWOT Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Dalam Perencanaan Program Desa Pintar Di Kabupaten Rokan Hulu**

	STRENGTH	WEAKNESS
INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Infrastruktur TIK berupa Fiber Optik dan Menara-P2P yang menghubungkan seluruh OPD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu; Jaringan Infrastruktur TIK berupa Menara P2P yang menghubungkan seluruh wilayah kecamatan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu; Data center dan ruang server yang sesuai standart; Program Aplikasi Pelayanan Surat menyurat SiMaya, Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Penduduk SiPandu, e-RFK Desa/Kel,</li> <li>Website Desa/Kel.</li> </ol>	<p>Jaringan Infrastruktur TIK belum terhubung dari kecamatan sampai ke Desa/Kelurahan; Tingkat Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) TIK aparatur Desa/Kel yang belum memenuhi syarat kecakapan; Budaya Kerja yang masih berbasiskan metode kerja manual/<i>Stand Alone</i>;</p>
EKSTERNAL		

OPPORTUNITY		STRATEGI SO	STRATEGI WO
1.	Tingginya tingkat kepemilikan Gadget (HP android/notebook/Laptop) masyarakat;	1. Melakukan tindakan teknis penguatan jaringan dan stabilitas konektivitas internet dan intranet antar OPD dan seluruh Kecamatan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu;	1. Mempersiapkan Dokumen Rancangan Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis implementasi program/kegiatan;
2.	Banyaknya kuantitas layanan publik dan administrasi kependudukan Desa/Kel;	2. Optimalisasi fungsi Data center dan ruang server yang sesuai standart;	2. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi program/kegiatan dibidang layanan publik berbasis TIK lintas sektoral antara Diskominfo sbg LO, OPD teknis, Kecamatan dan Desa/kelurahan;
3.	Adanya Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE;	3. Implementasi Progran Aplikasi Pelayanan Surat menyurat SiMaya, Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Penduduk SiPandu, e-RFK Desa/Kel, Website Desa/Kel.	3. Membuat rancangan sharing program antara diskominfo, kecamatan, dan desa/kel dalam upaya penyambungan jaringan intranet dan internet dg konsep MAN dan kecamatan sebagai sub sentral topologi jaringan WAN;
4.	Inovasi Program Unggulan OPD di Lingkungan Pemerintahan Kab. Rokan Hulu.		4. Melakukan pengembangan integrasi data lintas sektoral dalam rangka otomatisasi layanan publik;
THREAT		STRATEGI ST	STRATEGI WT
1.	Penolakan dari sebagian masyarakat yang merasa asing dengan metode kerja yang terotomatisasi dengan menggunakan TIK;	1. Optimalisasi fungsi Bidang Informasi dan komunikasi Publik Diskominfo dalam melakukan sosialisasi program/kegiatan layanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat;	1. Pengembangan Peningkatan SLA diskominfo sampai pelayanan tingkat Desa/kelurahan;
2.	Resistensi dari sebagian aparatur pelayanan yg belum terbiasa bekerja dengan menggunakan TIK dan menganggap TIK itu sulit dan Mahal;	2. Melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi SDM TIK secara komprehensif dan berkelanjutan.;	2. Penyusunan SOP prosedur layanan publik berbasis TIK;
3.	Pimpinan OPD atau pengambil kebijakan yang gagap teknologi dan gagal move on.	3. Revisi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2012 agar lebih relevan dengan target dan tujuan yang hendak dicapai; Instruksi Bupati tentang implementasi Perbup hasil revisi.	3. Penyusunan Aturan standard perangkat TIK yang digunakan.
4.	Pimpinan OPD atau pengambil kebijakan yang menganggap bahwa TIK itu mahal dan menyulitkan tanpa mempertimbangan capaian outcome yg akan didapat;		4. Pengembangan integrasi data dan peningkatan kapasitas server dan data center diskominfo;
			5. Merancang topologi jaringan triple play dengan peneyempurnaan architecture jaringan.

5	Belum tersedianya dasar Hukum Pelaksanaan Program, beserta juklak dan juknisnya.		
---	--	--	--

Dengan demikian dapat diketahui bahwa analisis SWOT merupakan faktor penting dalam merumuskan langkah-langkah strategis dalam menentukan Strategi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam perencanaan program desa pintar di Kabupaten Rokan Hulu, demikian juga dengan memetakan potensi peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang berasal dari faktor eksternal yang bertujuan untuk mengoptimalkan hasil eksploitasi peluang - peluang (opportunities) dan kekuatan - kekuatan (strengths), serta menghindari ancaman-ancaman (threats) dan meminimalisir kelemahan-kelemahan (weakness) yang dimiliki.

Dari tabulasi data, informasi, dan fakta hasil wawancara dan observasi teknis yang telah penulis lakukan, terlihat bahwa strategi pengembangan dan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu belum dapat dilaksanakan secara optimal karena selama ini Dinas Komunikasi dan Informatika belum memetakan kelemahan-kelemahan (weakness) dan kekuatan - kekuatan (strengths) yang dimiliki serta belum melihat secara obyektif dan melakukan penilaian secara komprehensif terhadap peluang-peluang (opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi itu sendiri yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah strategis dan juga menentukan tahapan-tahapan pelaksanaan program.

## PEMBAHASAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dalam pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu telah dimulai sejak masa awal berdirinya Kabupaten Rokan Hulu lebih kurang 18 tahun walaupun hanya sebatas pemanfaatan Personel Computer sebagai pendukung kinerja aparatur pemerintahan daerah, akan tetapi pelaksanaan e-

Government di Kabupaten Rokan hulu baru intens di lakukan sejak tahun 2012 yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2012 tentang e-Government, hingga akhir tahun 2013 telah dilakukan berbagai percepatan dalam mengejar ketertinggalan penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kinerja pelayanan pemerintahan. Akan tetapi pelaksanaan e-Government secara umum dalam penerapannya masih juga sulit diwujudkan jika stake holder Kabupaten Rokan Hulu masih melihat e-Government sebagai sesuatu yang terpisah dari pemerintahan umum dan layanan publik. Tidak heran apabila e-Government di kalangan internal pemerintah sendiri sulit berkembang, karena masih banyak yang memandang teknologi informasi pendukung e-Government sebagai perangkat canggih mahal dan sulit, bukan sebagai sesuatu yang bisa memudahkan untuk mengelola daerah.

Pemikiran skeptis dari sisi internal seperti itu menyebabkan publik juga memandang rendah kemampuan pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi bagi kepentingan publik. Padahal berbagai produk pemerintah yang kurang mengoptimalkan teknologi informasi berdampak pada gejolak dalam masyarakat, misalnya ketidakpercayaan masyarakat dan kalangan pelaksana dalam lingkungan pemerintah sendiri misalnya tentang data pemilih pemilu, transparansi anggaran, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

E-Government yang semestinya mampu menjadi jembatan koordinasi lintas sektoral untuk menghasilkan nilai tambah yang luar biasa, justru dihancurkan oleh ego sektoral yang dibijaksanai oleh pengambil kebijakan yang gagap teknologi. Ego sektoral yang juga menghasilkan belanja teknologi informasi dan e-Government sektoral menghasilkan produk sektoral pula dan

pada kenyataannya hal tersebut tidak serta merta menjadi tanggung jawab sektoral OPD yang bersangkutan. Dan karena pengembangan e-Government tidak dilandasi perencanaan komprehensif dan standarisasi e-Government lintas sektoral menyebabkan produk e-Government masing-masing OPD sangat variatif, mulai dari sisi pemilihan teknologi, proses bisnis, hingga duplikasi kewenangan dan database, antara lain terdapat fakta-fakta :

1. Saat ini, hampir tidak ada Pemerintah Kabupaten yang tidak menjalankan komputerisasi untuk layanan kependudukan dan bahkan jaringan Teknologi Informasi pun sudah tergelar pada beberapa bagian Pemerintah Daerah. Namun untuk memperpanjang KTP saja masih memerlukan waktu yang tidak sebentar;
2. Saat ini, DPMPTSP banyak yang sudah beroperasi di beberapa Pemerintah Daerah, bahkan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang canggih, namun untuk melakukan pengurusan perijinan masih harus melalui prosedur manual dan memakan waktu yg cukup lama;
3. Saat ini, meskipun Dinas Kependudukan dan catatan sipil sudah mengelola data dan informasi kependudukan yang dinyatakan cukup valid, namun Dinas-Dinas lain masih enggan memanfaatkannya untuk menopang aplikasi sektoral mereka. Mereka lebih suka melakukan entry data penduduk/warga melalui aplikasi sektoral mereka sendiri seperti data siswa sekolah, data pasien, data tenaga kerja, data pegawai, dan lain-lain, yang kenyataannya data-data tersebut sudah ada pada data base server kependudukan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil.
4. Saat ini, dinas pengelolaan keuangan dan aset, kesehatan, pendidikan, sosial dan tenaga kerja, DPMPTSP dan lain-lain, melalui aplikasi e-Government sektoral mereka telah menghasilkan banyak informasi yang luar biasa namun informasi-informasi tersebut hanya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan OPD tersebut sendiri. Belum terbangun lintas infor-

masi sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan OPD lain, seperti bagi kepentingan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan lainnya.

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah Kab. Rokan Hulu maka dirasa perlu untuk membuat suatu program dan kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat pada tingkat pelayanan terendah. Pada dasarnya Pemerintahan itu ada karena adanya komunitas masyarakat yang membutuhkan pelayanan demi keteraturan dan peningkatan kesejahteraan hidup. Dan pelayanan masyarakat sesungguhnya berawal dari pelayanan birokrasi pada tingkat desa dan kelurahan yang berbasis pada data kependudukan.

Program/kegiatan ini secara umum dilaksanakan untuk Percepatan reformasi birokrasi di tingkat desa dan kelurahan, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan. Secara khusus Program/kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan efisiensi waktu dan efektifitas pelayanan publik, yang kedua agar terciptanya pelayanan publik yang integrated, dan yang ketiga adalah agar terbukanya keterpencilan informasi dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK).

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah terintegrasinya pelayanan publik, terintegrasinya data base kependudukan, Pelayanan publik yang lebih selektif dan tepat sasaran, dan penghematan anggaran.

Upaya optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dalam operasional pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika harus melakukan pemetaan potensi dan peluang-peluang, sekaligus mengkaji aspek-aspek mana saja yang menjadi kelemahan dan ancaman terhadap program kerja yang sudah direncanakan untuk menentukan strategi yang seperti apa yang akan digunakan dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Dalam Perencanaan

Program Desa Pintar di Kabupaten Rokan Hulu.

Dinas Komunikasi dan Informatika harus mampu mengidentifikasi situasi dan kondisi baik internal maupun eksternal organisasi, berkaitan dengan hal tersebut dapat dijabarkan secara detail dalam analisa sebagai berikut :

#### *Strenght (Kekuatan)*

Merupakan kondisi eksisting yang bersifat positif dari potensi yang bersumber dari faktor intenal organisasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor dalam pengembangan, pemanfaatan dan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Potensi-potensi dimaksud dalam hal ini mencakup pada kondisi (1). Infrastruktur Jaringan internet dan intranet, (2). Tata kelola topologi jaringan dan bandwidth management, (3). Implementasi pemakaian aplikasi yang telah dikembangkan (4). Pengelolaan informasi dan komunikasi publik (5). Kompetensi sumber daya manusia (SDM) TIK pelaksana instrumen kebijakan pelayanan publik.

#### *Weaknesses (W)*

Kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) adalah keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki untuk memenuhi syarat kelengkapan sumber daya dalam suatu organisasi atau pengorganisasian sebuah perencanaan. Implementasi dari sebuah perencanaan bisa saja menjadi kacau balau dalam tataran pelaksanaan dikarenakan rendahnya ketrampilan dan kapabilitas kompetensi sumber daya yang dibawah standart.

#### *Opportunity (O)*

Analisis terhadap peluang-peluang (*Opportunity*) harus difokuskan pada situasi atau kondisi yang dapat memberikan peluang keberlangsungan implementasi program dimasa mendatang. Peluang ataupun terobosan yang diupayakan untuk memungkinkan pelaksanaan program dapat berkelanjutan dan berkembang di masa mendatang. Sedangkan dalam observasi lapangan yang di-

lakukan selama rentang waktu 5 s/d 9 November 2018 di kelurahan Pasir Pengarayan, dari 30 orang yang datang dan berurusan di kelurahan hanya ada 2 (dua) orang penduduk yang tidak membawa atau memanfaatkan teknologi komunikasi android, artinya ada 28 orang yang memakai HP android atau telepon tablet, dengan kata lain hanya ada 6,66% penduduk yang tidak menggunakan teknologi android dalam berkomunikasi, dan 93,44% penduduk yang meminta layanan dan berurusan di kantor Lurah Pasir Pengarayan yang menggunakan teknologi komunikasi.

#### *Threats (T)*

Ancaman-ancaman (*threats*), merupakan kondisi-kondisi dalam lingkungan umum yang dapat mengganggu upaya organisasi dalam mencapai daya saing strategisnya dan kondisi dari luar lingkungan organisasi. Ancaman juga merupakan unsur-unsur lingkungan luar negatif yang menghambat kegiatan organisasi dan merupakan pengganggu dan penghalang utama dalam implementasi strategi. Ancaman terbesar dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam perencanaan program desa pintar di Kabupaten Rokan Hulu adalah Penolakan dari sebagian masyarakat yang merasa asing dengan metode kerja yang terotomatisasi dg menggunakan TIK dan Resistensi dari sebagian aparatur pelayanan yg belum terbiasa bekerja dengan menggunakan TIK, serta sikap pimpinan OPD atau pengambil kebijakan yang gagap teknologi dan gagal *move on*. Hal ini disimpulkan dari hasil pengumpulan fakta informasi yang di dapat dilapangan, baik melalui pengamatan secara langsung maupun wawancara dengan informan tambahan.

### **SIMPULAN**

Desa Pintar memiliki perbedaan dengan konsep *Smart City* yang lebih dulu dikenal. Konsep *Smart City* terutama lebih menekankan aspek kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui peningkatan kualitas layanan publik. Kebijakan dan konsep *Smart City* terutama lebih bersifat

*top-down* di mana TIK diterapkan dengan penduduk kota sebagai *end-user* yang diharapkan dengan cepat belajar dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan. Berbeda dengan *Smart City*, konsep Desa Pintar lebih menekankan pada aspek perubahan sosial, pemberdayaan, kemandirian, kebersamaan dan keberlanjutan, dimana di dalamnya lebih dulu mengkaji dan memperhatikan aspirasi kebutuhan perekonomian rakyat dan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yang selama ini terpinggirkan. Pengembangan Desa Pintar dilakukan dengan pola berbasis komunitas dengan salah satu tujuan utama untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan, sehingga untuk menerapkannya harus dilakukan perencanaan dan pemetaan masalah melalui proses kajian yang memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

Untuk itu kajian secara multi disiplin baik dari segi sosiologi, sejarah, politik dan ekonomi mutlak harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pendekatan secara teknologi diterapkan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Luankali, Bernadus. 2007. Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan. Jakarta : Amelia Press.
- Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Suharno. 2013. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta : Ombak.
- Winarno, Budi, 2008. Kebijakan Publik Teori & Proses. Yogyakarta : MedPress.
- Rangkuti, Freddy. 2009. Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication. Jakarta : PT. GramediaPustakaUtama.